
**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL BERBASIS APLIKASI SIKS-NG DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN SAMPANG**

Tajul Ulum, Muhamad Rifa’I, Annisa Purwatiningsih

Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana

Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, Indonesia

tajululum689@gmail.com, annisa.pn97@gmail.com

ABSTRAK

Regulasi transformasi digital memberikan pemahaman tentang pentingnya digitalisasi untuk menghadapi paradigma kerja sesuai tuntutan zaman. Transformasi digital sesuai regulasi di Indonesia terkait big data. Pemerintah akan menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan fasilitas perlindungan sosial serta mendukung monitoring dan evaluasi. Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024” (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Program Jaminan Kesejahteraan Sosial yang merupakan suatu sistem yang dilaksanakan oleh negara dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan negara lainnya serta program-program yang dilaksanakan oleh Sistem Jaminan Sosial, pemberdayaan masyarakat diprioritaskan bagi fakir atau miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sampang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun belum optimal karena data masih ditemukan permasalahan mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat tidak sinkron dan data belum terupdate. Faktor penghambatnya adalah masih banyak data masyarakat yang tidak sinkron dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penggunaan data penerima bansos belum dimutakhirkan dan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Urusannya masih belum terarah secara optimal.

Kata Kunci: Efektivitas Pengelolaan Data, Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial

PENDAHULUAN

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai upaya mengekskalasi pelayanan publik telah dikerjakan secara sistematis di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Sampang. Penyelenggaraan pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Sampang memiliki kompleksitas dalam pelaksanaannya. Indikasi yang ditemui antara lain, penguasaan teknologi dalam tata kerja oleh operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat Desa atau Kecamatan yang mempengaruhi kinerja; Peran pimpinan dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan; rendahnya capaian yang mempengaruhi kepuasan kerja; dan sistem informasi manajemen yang kurang memadai. Indikasi yang ditemukan pada pelaksanaan penyelenggaraan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Sampang, selanjutnya memiliki telaah ilmiah yang dapat didefinisikan. Lemahnya penguasaan teknologi berdampak pada kinerja memberikan pemahaman bahwa kinerja memerlukan suatu kesepahaman pada individu atau kelompok untuk menghasilkan output dan outcome sesuai

tujuan kerja, rencana, dan atau standar yang telah disepakati BDT memuat nama dan alamat (by name by adress) sekitar 40 persen penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Selain memuat nama dan alamat, BDT juga memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi.

Namun Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kabupaten sampang belum optimal, ketidakefektifan tersebut disebabkan pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam pemutakhiran data masyarakat pada petugas pendataan. Pemutakhiran data merupakan sebuah langkah dalam pembaharuan data menuju data yang berkualitas. Kegiatan pemutakhiran data dilakukan melalui verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota secara berkala.

Efektifitas Pengelolaan Data

Mengacu pada teori Gibson (1987:25) mengenai keefektifan, dikatakan bahwa keefektifan adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, Kelompok dan organisasi. Pegawai Negeri Sipil sebagai seorang individu merupakan pelaku dalam efektivitas Individu. Dalam Prespektif keefektifan, dibagi dalam tiga tingkatan dan bagian yang paling mendasar adalah keefektifan Individu.

Pegelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja. (Ratnawati, 2020)

Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain :Planning (Perencanaan) Organizing (Pengorganisasian) Commanding (Pemberian perintah) Coordinating (Pengkoordinasian) Controlling (Pengawasan).

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Ciri Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan Dan Taylor dalam Moleong (2014:4) penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Argmen ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi harus memandangnya sebagai bagian dari sebuah keutuhan. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang- Undang No 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1). Aplikasi program pendataan kesejahteraan sosial *Next Generation* harus ditingkatkan terhadap kepedulian masyarakat sekaligus mensejahterahkan rakyat. Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sampang mempunyai program aplikasi program pendataan kesejahteraan sosial. Ketetapan Sasaran program merupakan target dari pemerintah yang hendak dijadikan sebagai peserta program kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Kabupaten Sampang dengan maksud agar program ini memiliki nilai kebermanfaatannya yang lebih tinggi bagi masyarakat.

Perencanaan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sampang

Perencanaan mencakup proses penetapan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengelolaan DTKS ialah untuk memperoleh data masyarakat yang valid dan aktual sesuai dengan dilapangan (Operator pengelola DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Sampang).

Efektivitas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di kabupaten sampang sudah efektif, setelah melihat hasil kerja operator SIK-NG dalam mensinkronisasikan data Kementerian Sosial dan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, sehingga "data-data siluman" yang awalnya sebagai calon penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Sampang dihapus secara permanen setelah menyesuaikan dengan data yang ada di Kementerian Sosial, berdasarkan NIK yang terupdate di dinas kependudukan di Kabupaten Sampang.

Penghapusan data secara berkala demi mensinkronisasikan data penerima bantuan sosial setempat, dengan tujuan penyaluran bantuan sosial bisa tetap sasaran kepada masyarakat yang sudah terpilih sebagai calon penerima bantuan tersebut, dan juga akan mempermudah dalam mengevaluasi karena data yang digunakan dalam penyaluran bantuan terhadap masyarakat pemerintah menerapkan data tunggal demi menghindari data ganda yang ada di Kementerian Sosial.

Model Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Berbasis Aplikasi Siks-Ng

Model Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Berbasis Siks-NG pada Dinas Kesejahteraan sosial untuk mengatasi problema masyarakat miskin atau tidak mampu yang dihadapkan banyak faktor baik secara internal maupun eksternal. Program-program sosial yang telah direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, usaha tersebut untuk bisa terealisasi secara merata dan optimal dengan menggunakan system modern yang terbaik dalam pelaksanaan program tersebut.

Program Jaminan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu sistem yang dilakukan negara dan pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat, seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Perundang-undangan negara lainnya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran utama atau aktor dari sistem perencanaan kesejahteraan rakyat tersebut. Untuk itu, sistem yang di bangun haruslah terprogram dan terlaksana dengan sebaik- baiknya, serta diperlukan adanya kerja sama yang baik antara semua instansi yang terkait.

Model pengelolaan data terpadu berbasis aplikasi siks-ng sebagai bentuk model modern yang efektif dan efisien. Program yang dilakukan oleh Sistem Jaminan Sosial untuk pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas adalah masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Dimana hak-hak mereka sebagai warga negara harus dipenuhi seperti yang dijanjikan. Namun untuk mengatasinya pada masyarakat yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi secara baik

dan merata baik secara fisik maupun non fisik, di bangun suatu srategi yang terarah demi mensejahterakan rakyat. Dengan alasan yang kuat bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan itu

KESIMPULAN

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sampang sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun belum optimal, Faktor penghambat ialah masih banyaknya data masyarakat yang tidak sinkron dengan data di Disdukcapil, penggunaan data penerima bantuan sosial banyak yang belum terupdate dan data yang ditetapkan Kementerian Sosial masih tidak tepat sasaran.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta. Rineka Cipta.2013
- Bappenas. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dataterpadu Kesejahteraan Sosial*.8(5),55.2019-2020
- D. Riani, G. Agung, A. Putri, P. Agus, and E. Pratama, "E. Readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar)," *J. Ilm. Teknol. dan Komp. ut.*, vol. 2, no. 3, pp. 1–12, 2021.
- J.EKaawoan,G.T.,& Rachman,I.(2019).Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Kuma Kecamatan EssangSelatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1-10.
- I. D. Sujatmiko, I. G. Lanang, and P. Eka, "Implementasi Technology Acceptance Model 3 (TAM 3) Terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi Investasi dan Trading Saham (Studi Kasus : Aplikasi Mobile IPOT)," (*Journal Emerg. Inf. Syst. Bus. Intell.* vol. 03, no. 01, pp. 35–44, 2022.
- Latuharhary,J.T.,Mantiri, M.S.,& Sampe,S. *Pengelolaan Aset Daerah (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon)*. 2014
- Matthew B. Miles, A Michael Hubermas and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*.3 Edition. Sage Publication Inc. 2455 Teller Road Thousand Oaks. California,2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya,2014
- PUSDATIN.(2020).SIKS-NG.[https://dtks.kemensos.go.id/Profil DTKS/topic/333](https://dtks.kemensos.go.id/Profil_DTKS/topic/333)(Di Akses Pada Tanggal 04 Desember 2021).
- Ratnawati.Pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Sengkang Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wajo. *Journal of Chemical Information and Modeling*,53(9),1689-1699.2020
- Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2016